

**ANALISIS KELALAIAN PENGGUNAAN SENJATA API OLEH APARAT  
KEPOLISIAN (STUDI PUTUSAN PENEMBAKAN KEPALA RS.  
BHAYANGKARA)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Oleh

**MUHAMMAD RAI HARAHAP**  
**NIM. 10500110074**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2014**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar,...20 Mei 2015

Penyusun,

**Muhammad Rai Harahap**

NIM: 10500110074

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan proposal skripsi Saudara **Muhammad Rai Harahap**, NIM: 10500110074, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama proposal skripsi berjudul, “Analisis Kelalaian Penggunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian (Studi Putusan Penembakan Kepala RS. Bhayangkara)”, memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui diseminarkan. Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 17 Juli 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

**Rahman Syamuddin, SH., MH**  
**NIP . 198212072009011010**

**Abdi Wijaya, M.Ag., M.Hi**  
**NIP. 19711005200511009**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul “Analisis Kelalaian Penggunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian (Analisis Putusan Penembakan Kepala RS. Bhayangkara). yang disusun oleh Muhammad Rai Harahap, NIM: 10500110074, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 22 Desember 2014 M

### **DEWAN PENGUJI**

Ketua	:	Prof. Dr. H. Ali Parman, MA.	(.....)
Sekretaris	:	Dr. Hamsir, M.Hum.	(.....)
Penguji I	:	Ahkam Jayadi, SH., MH.	(.....)
Penguji II	:	Drs. H. Munir Salim, MH.	(.....)
Pembimbing I	:	Rahman Syamsuddin, SH., MH.	(.....)
Pembimbing II	:	Abdi Wijaya, M.Ag.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,

**Prof. Dr. H. Ali Parman, MA.**  
NIP. 19570414 198603 1 003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Kelalaian Penggunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian (Studi Putusan Penembakan Kepala RS. Bhayangkara)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana hukum bagi mahasiswa program S1 pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN). Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Penulisan skripsi ini tidak akan pernah berhasil tanpa doa dan dukungan dari segenap keluarga besar penulis, terkhusus pada orang tua tercinta, yaitu ayahanda Muh. Daud Harahap penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan serta doa restu yang tulus yang diberikan kepada penulis.

Selain itu penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Rahman Syamsuddin, SH.,MH selaku pembimbing I dan Bapak Abdi Wijaya, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

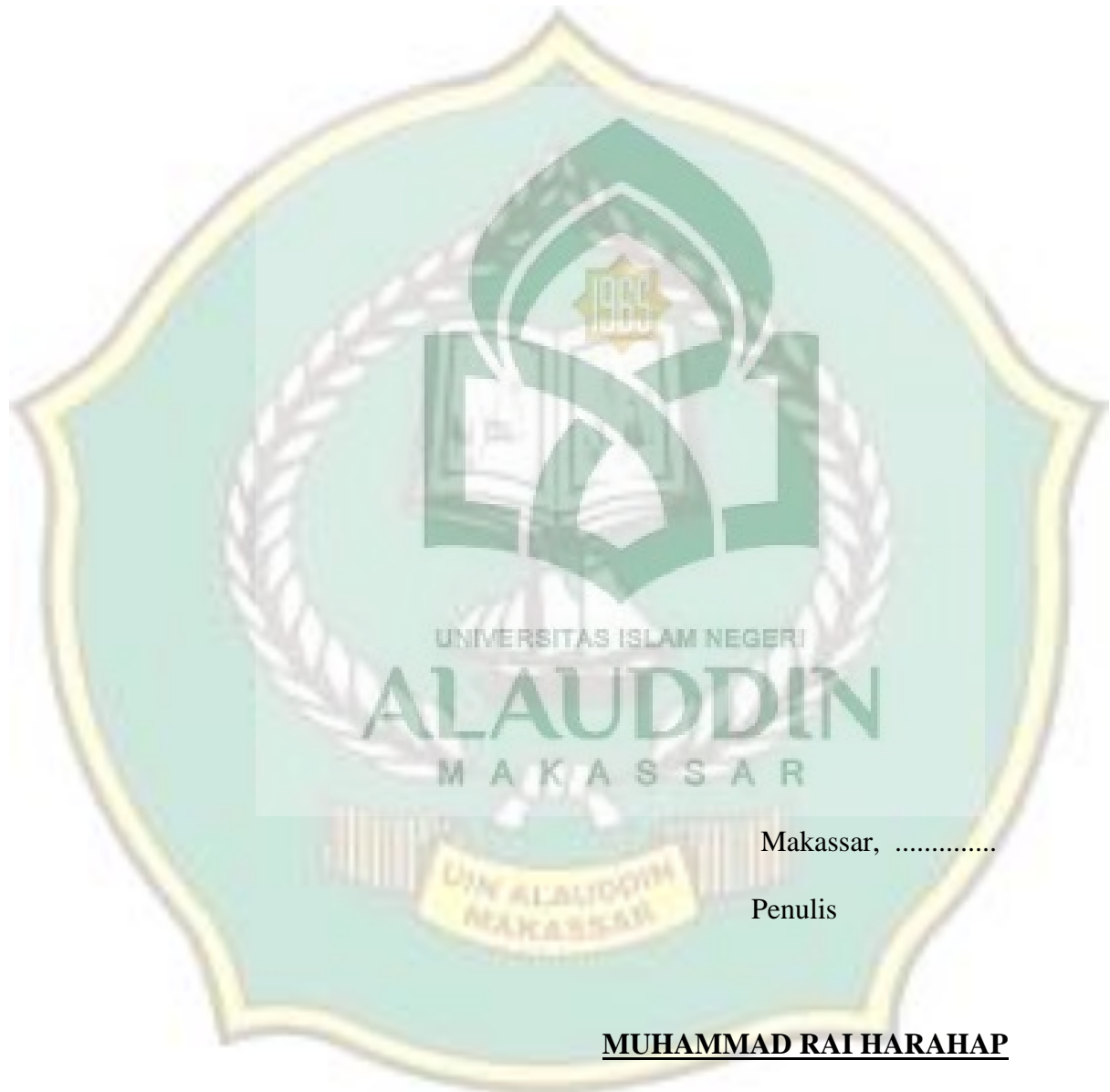
1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin selaku pimpinan tertinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A. selaku Dekan, dan Jajaran Wakil Dekan satu, dua, dan tiga Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Samata.
3. Bapak Dr. Hamsir, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Samata.
4. Ibu Istiqamah, Sh., M.H selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum
5. Bapak Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya program studi Ilmu Hukum.
6. Bapak Ibu pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Samata.
7. Rekan-rekan Mahasiswa Universitas Islam Negeri samata, khususnya jurusan Ilmu Hukum dan terkhusus lagi pada rekan-rekan Ilmu Hukum 3-4.
8. Rekan-Rekan Seperjuangan, Muhammad Dzhury Ramadhan, Rahman Conk, Wiro Rian Ardiansyah, Muh, Wahyu Darmawansyah, Said, BLHB, dan yang ter-Spesial Radiah H.M Tahir yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada



dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi  
siapa pun yang membacanya.



Makassar, .....

Penulis

**MUHAMMAD RAI HARAHA**

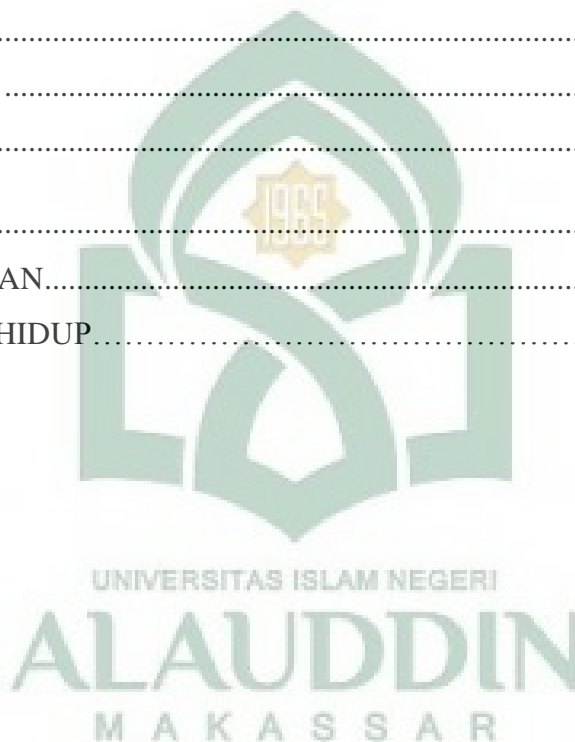
NIM.10500110074

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	16
A. Teori kesalahan.....	16
B. Teori Pertanggung Jawaban Pidana.....	18
C. Etika dan Kode Etik Kepolisian .....	21
D. Faktor Timbulnya Kelalaian Aparat dalam Menggunakan Senjata Api. ....	22
E. Penerapan Sanksi Terhadap Aparat Yang Melakukan Tindak Pidana Sesuai Perundang undangan.....	22
F. Kerangka Konseptual .....	25
BAB III METODE PENELITIAN .....	28
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	28
B. Pendekatan Penelitian .....	28
C. Metode Pengumpulan Data.....	29
D. Instrumen Penelitian.....	30
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	30
F. Pengujian Keabsahan Data.....	31



BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....	32
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor/1149/Pid.B/2013/PN.MkS .....	32
B. Pertimbangan Hukum Materil dan formil Putusan Nomor/1149/Pid.B/2013/PN.Mks.....	53
1. Pertimbangan Hukum Materil .....	53
2. Pertimbangan Hukum Formil .....	62
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67



## ABSTRAK

**Nama : Muhammad Rai Harahap**  
**NIM : 10500110074**  
**Jurusan : Ilmu Hukum**  
**Judul : Analisis Kelalaian Penggunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian (Studi Putusan Penembakan Kepala RS. Bhayangkara)**

---

Penulisan skripsi ini menitik beratkan penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan terkhusus pada Perkap Polri Nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik Kepolisian.

Dari Latar belakang masalah yang terjadi, penulis mencoba mengkaji dan meneliti lebih lanjut yang bertujuan, melihat sejauh mana kepatuhan aparat Kepolisian terhadap Undang-Undang yang menyangkut tentang pekerjaan mereka terlebih kepada kode etik dan ketaatan terhadap aturan tersebut, melalui analisis putusan dari perkara kelalaian dari aparat dalam menggunakan senjata api, dan juga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan amar putusan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana seperti judul skripsi ini.

Dalam Penelitian ini peneliti berusaha menggali informasi berupa fakta dari analisis putusan dari Pengadilan Negeri Makassar dan dengan melakukan tanya jawab terhadap pihak Pengadilan Negeri Makassar.

Dari hasil penelitian dengan menganalisis kasus putusan dari Pengadilan Negeri Makassar terdapat beberapa fakta yang mengungkapkan tentang terjadinya pelanggaran kode etik Kepolisian tentang penggunaan senjata api, dan terhadap penerapan putusan bagi aparat yang melakukan tindak pidana.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu membawakan pertumbuhan dan perkembangan dalam segala kebutuhannya, termasuk segala segi dan pengaturannya dalam kehidupan. Penemuan baru dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa pengaruh langsung terhadap pandangan hidup manusia, yang akhirnya dapat merubah cara hidup manusia.

Perubahan-perubahan ini selalu dengan timbulnya kepentingan-kepentingan baru untuk kelangsungan hidupnya memerlukan perlindungan terhadap gangguan-gangguan yang mungkin datang dari sesama manusia. Perlindungan ini oleh negara diberi dalam bentuk pengeluaran segala peraturan-peraturan hukum.

Dihadapkan dengan perkembangan yang demikian pesat, hukum pun berkembang kearah difrensiasi dan spesialisasi. Bidang-bidang hukum tertentu melepaskan diri dari induknya dan berdiri sendiri sebagaimana halnya ilmu hukum itu sendiri lepas dari induknya yaitu filsafat. Demikianlah suatu masyarakat yang modern menghendaki hukum. Sementara itu timbul pula persoalan baru sebagai akibat dari difrensiasi dan spesialisasi, yaitu yang berupa penegakan hukum yang semakin bertambah sulit oleh karena memerlukan pula pemikiran tentang sistem kontrol yang sesuai dengan perkembangan tersebut. Persoalan penegakan hukum menjadi tidak akan ada hentinya dibicarakan, apalagi kita selalu menyadari bahwa di dalam masyarakat selalu terdapat dua kekuatan, yaitu disatu pihak kekuatan yang mempersatukan dan dilain pihak kekuatan yang memecah akibatnya pertikaian akan selalu ada dan memungkinkan persoalan

penegakan hukum atau masalah "Rule Of Law" dan "Law enforcement" akan merupakan persoalan yang selalu update oleh karena memang diperlukan demi langsung lestari masyarakat dan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Seperti di katakan oleh Rosco Pound bahwa: "manusia, sebagai sejarah peradapan dewasa ini dan dahulupun hidup didalam kelompok-kelompok atau gabungan atau didalam hubungan yang menurut tabiatnya mengandung suatu" ketertiban dalam" (inner- order) yang jika tidak ada manusia tidak akan adapula. "ketertiban dalam" hal ini dipelihara oleh semacam kontrol sosial".

Di bagian lain dari bukunya, Rosco Pound memberikan pernyataan pula tentang bagaimana caranya "ketertiban-dalam" itu di pertahankan, sebagai ternyata dalam kutipan dibawah ini: "tetapi karena tiap-tiap kelompok dan perkumpulan ini mempunyai "ketertiban dalam" sendiri yang dipelihara oleh beberapa bentuk kontrol sosial, maka masyarakat politik yang teraturpun mempunyai "ketertiban-dalamnya", yang dijaga pejabat dan badan-badanya. Demikianlah di dalam tiap masyarakat yang berorganisasi politik terdapat apa yang kita namakan ketertiban hukum suatu bentuk yang sangat khas dari kontrol sosial".

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (Rechstaat) tidak berdasarkan atas kekuatan belaka (Macstaat) maka segala kekuasaan negara harus diatur oleh hukum. Adanya dukungan kewibawaan itu lebih terlihat urgensinya apabila kita hubungkan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Dengan mengingat bahwa pejabat adalah orang-orang pribadi, dan hukum yang dapat diterapkan kepada mereka adalah hukum yang boleh diterapkan

kepada tiap orang lainya. Jadi dengan adanya hukum yang mengatur secara khusus tentang tugas, organisasi, status dan wewenang dari badan-badan penegak hukum tadi maka tindakan-tindakan mereka didalam rangka wewenang hukum dapat dibenarkan, sedangkan tindakan yang diatur yang melampaui batas wewenang hukumnya atau memang mereka tidak mempunyai wewenang hukum untuk bertindak sewewenang-wenang dan tidak wajar, harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi.

Negara Indonesia yang di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai tujuan yang jelas sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea ke IV (empat) yaitu: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedulatan rakyat dengan berdasarkan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut dibagi dalam bermacam-macam fungsi pemerintahan negara dimaksudkan agar ada pembagian tugas yang jelas antara lembaga yang satu dengan yang lainnya, sehingga mudah untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dari masing-masing lembaga negara tersebut. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya

perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang. Termasuk tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia terhadap masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kemajuan masyarakat tersebut maka timbul perubahan tuntutan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anggota masyarakat.

Tuntutan perlindungan ditujukan kepada pemerintah dalam hal ini adalah lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 (satu) Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang menjadi sorotan tajam masyarakat Indonesia sekarang ini adalah berkisar pada persoalan tindakan-tindakan badan-badan pemerintah yang melampaui batas wewenang hukumnya. Sudah barang tentu termasuk di dalam sorotan terhadap tindakan-tindakan dari pada badan-badan penegak hukum terutama polisi. Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademis bahkan masyarakat kebanyakan dan pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peran Kepolisian tersebut. Upaya pengupasan Kepolisian itu dikarenakan adanya faktor-faktor dari berbagai pihak kepada Lembaga Kepolisian dan ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Juga tidak bisa berhenti sampai disitu, atensi itu termasuk juga merubah struktur Kepolisian secara kelembagaan, dimana organisasi Kepolisian mulai dari bawah Institusi

sipil, ABRI/Militer, sampai dengan berdiri sendiri, merupakan sejarah yang unik. Polisi Republik Indonesia dalam tugas dan fungsinya terhadap masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, memberikan perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam praktek dilapangan belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Diusianya yang sudah dewasa, Polri seharusnya sudah menanggalkan citranya sebagai Institusi konvensional. Watak-watak primitif Institusi Polisi yang identik dengan (orde baru) masih juga muncul. Profesionalisme Kepolisian masih belum teruji dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan penjaga keamanan. Padahal pasca reformasi sektor keamanan-pertahanan, masyarakat sangat berharap Institusi ini bisa mengambil peran penting dan strategis yang sesungguhnya. Sayangnya kinerja Kepolisian belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini terlihat dalam berbagai bentuk persoalan penting yang bisa mengindikasikan bahwa: Pertama, Mutu anggota Polri yang masih minim akibat proses seleksi dan pelatihan hanya sedikit perhatiannya pada norma Hak Asasi Manusia. Pelatihan penggunaan senjata api terus diutamakan, mengabaikan pelatihan skill lain. Kedua kultur "militeristik" yaitu dengan mengedepankan metode kekerasan masih sulit diubah dalam Kepolisian yang sudah menjadi Institusi sipil. Kebutuhan publik akan fungsi Kepolisian sangat berbeda dengan peran militer. Belum tampak perubahan yang nyata dari watak militeristik yang inheren sejak masa orde baru. Kekerasan dan praktek pelanggaran Hak Asasi Manusia antara lain penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, dan lain-lain masih melekat pada Institusi ini.

Polisi menjadi contoh nyata dari paradoks penegakan hukum, dimana mereka sebagai penegak hukum tidak mengurangi kejahatan dan kekerasan, namun justru menambahkannya. Suatu kondisi yang menyedihkan, dimana aparat



Kepolisian yang dikenal sebagai penegak hukum justru melanggarnya ketika mereka menegakkan hukum yang mereka yakini. Ketiga minimnya kontrol eksternal terhadap Institusi Kepolisian. Untuk yang terakhir ini misalnya, Polisi mengedepankan mekanisme penyelesaian internal bila mendapati anggotanya melakukan suatu kejahatan. Pasca pemisahan Kepolisian dengan TNI belum menjawab persoalan apakah Polisi bisa dikontrol secara efektif. Sejauh ini menguatkan posisi Kepolisian Republik Indonesia tidak diimbangi oleh akuntabilitasnya.

Polri memperoleh amanat dari Undang-Undang selaku alat negara yang bertugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ketiga tugas tersebut tidak bersifat hirarkie prioritas dan tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam koridor memelihara kamtibmas. Atau dapat pula dimaknai, bahwa tindakan Kepolisian berupa penegakan hukum pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindak kejahatan supaya terwujud kamtibmas.<sup>1</sup>

Implementasi dari tugas Polri tersebut, masyarakat mengharapkan Polri mampu menghilangkan (atau menanggulangi) setiap permasalahan sosial dalam masyarakat. Sebagai mana prioritas utama aparat Kepolisian yang dijelaskan dalam UU No.2 tahun 2002, Sepintas harapan ini seolah-olah berlebihan karena berharap Polri mampu menyelesaikan semua permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Namun apabila ditelaah mendalam, harapan ini tidak berlebihan karena pada dasarnya setiap permasalahan sosial berpotensi

---

<sup>1</sup>Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*(Jakarta, 2005) h. 22-23

berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mengganggu aktivitas masyarakat apabila tidak diselesaikan tuntas.<sup>2</sup>

Harapan masyarakat yang cukup besar tersebut menunjukkan betapa masyarakat memberikan kepercayaan cukup besar kepada Polri. Masyarakat sangat mengharapkan Polri mampu mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif dengan memberantas segala tindak kejahatan, sehingga masyarakat merasa aman dalam menjalankan aktivitas dan kehidupannya sehari-hari.<sup>3</sup>

Sejalan dengan era reformasi yang di dalamnya telah diagendakan secara nasional, yaitu reformasi di bidang politik, ekonomi dan hukum, Polri juga menjadi sasaran utama untuk direformasi karena reformasi merupakan reaksi masyarakat terhadap praktek penyelenggaraan negara.

Terkait reformasi Polri dibidang kultural, masyarakat belum merasakan adanya perubahan yang signifikan, sikap dan perilaku anggota Kepolisian masih belum banyak berubah.” *Menembak salah, tidak menembak salah, ditembak pun salah, apa yang salah denganmu, polisi?* Pemberitaan tentang Polisi yang melakukan penembakan sering menjadi perhatian publik, terlebih terhadap polisi yang salah tembak. Tidak sedikit Polisi yang kemudian diperiksa, ditindak, dan diajukan ke sidang Pengadilan atau kode etik profesi karena dinilai salah tembak, atau melanggar HAM.

Kajian yuridis, Dasar hukum tentang boleh atau tidaknya Polisi melakukan penembakan secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat (1) tentang Noodweer dan ayat (2) tentang ‘Noodweer Exces’. Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur tentang Pembelaan Terpaksa

---

<sup>2</sup>David H. Bayley, *Police For The Future*(Cipta Manunggal, 1998) h.29

<sup>3</sup>Chairuddin Ismail, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri* (Jakarta: Merlyn Press, 2011) h. 77.

(Noodweer), yang rumusannya 'Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana'.<sup>4</sup>

Dengan ketegasan-ketegasan demikian yang telah dipaparkan diatas, sangat jelas bahwa tugas Polri adalah menegakkan hukum dan menciptakan keamanan, tanpa pernah melakukan tindakan-tindakan yang dianggap berlebihan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, terkait dengan penggunaan senjata api oleh aparat Kepolisian telah diatur pula oleh UU yang telah dijelaskan pada paragraph sebelumnya,

Tujuan penulis dalam hal ini memaparkan wewenang dan tanggung jawab Kepolisian yang dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di Negara Indonesia ini khususnya Kota Makassar, yang pada intinya mengarah pada tindak kelalaian pihak aparat Kepolisian dalam menggunakan senjata api yang terkadang melupakan aspek-aspek penggunaan senjata api yang sewajarnya mesti dipatuhi oleh aparat Kepolisian tersebut. Sifat-sifat lalai ini adalah sifat yang tidak terpuji sebagaimana dijelaskan pada Q.S. Al-Araf/ :179.<sup>5</sup>

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya:

*Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu seperi*

<sup>4</sup>Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, h. 110.

<sup>5</sup><http://users6.nofeehost.com/alquranonline>, diakses 7 juni 2014

*binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. (QS. Al 'Araf : 179)*

Keprofesionalan dan proporsionalitas aparat Kepolisian jadi bahan acuan utama dalam kejadian-kejadian yang menyangkut kelalaian penggunaan senjata api tersebut,

Menyinggung tentang permasalahan penggunaan senpi (senjata api), Sesungguhnya penggunaan senpi haruslah sangat sensitif dan selektif, tidak disetiap kondisi penanganan kejahatan Polisi harus menunjukkan, menodongkan bahkan meletuskan senpi miliknya : tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian adalah: mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum; mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat; melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.<sup>6</sup>

Penggunaan senpi oleh aparat Kepolisian mesti melalui beberapa tahapan guna menghindari terjadinya kasus-kasus penyalahgunaan senjata api tersebut “kelalaian”. Sebenarnya hal-hal yang menjadi syarat penggunaan senjata api oleh aparat Kepolisian telah terapkan oleh Instansi Kepolisian yang di antaranya, Pemberian ijin melalui mekanisme ujian terhadap aparatur, dengan mempertimbangkan mental, keprofesionalan, proporsionalitas, serta pelatihan-pelatihan yang lebih intensif.

---

<sup>6</sup>Pasal 2 Perkap 01 tahun 2009

## **B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus**

Dalam Penelitian ini yang menjadi fokus kajian ialah penyebab terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh aparat Kepolisian disertai aspek-aspek yang menimbulkan kelalaian oleh aparat Kepolisian terkait.

## **C. Rumusan Masalah**

Perkembangan meningkatnya penyalahgunaan senjata api oleh aparat Kepolisian yang disebabkan oleh kelalaian dikarenakan aparat tersebut menyepelekan keprofesionalitasan sebagai seorang aparat penegak hukum, berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan ;

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menyatakan putusan Nomor/1149/Pid.B/2013/PN.Mks.?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum materil dan formil putusan Nomor/1149/Pid.B/2013/PN.Mks.?

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Analisis**

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>7</sup>

### **2. Aspek-aspek Kelalaian Penggunaan Senjata api**

Kelalaian atau dalam hal ini dikaitkan tindakan sembrono yang sering dilakukan para pemilik senjata api secara umum dan secara khusus dalam penulisan ini membahas tentang pihak aparat Kepolisian yang melakukan

---

<sup>7</sup>KBBI di akses<http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis> 4 juni 2014

tindakan kelalaian disebabkan karena aparat tersebut melupakan aspek-aspek yang sangat penting dalam hal izin menggunakan senjata api yang mengarahkan aparat tersebut menjadi lalai, diantaranya;

a. Prinsip-prinsip dalam menggunakan senjata api

1) *LEGALITAS*,

Kajian yuridis, Dasar hukum tentang boleh atau tidaknya polisi melakukan penembakan secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat (1) tentang Noodweer dan ayat (2) tentang 'Noodweer Exces'. Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur tentang Pembelaan Terpaksa (Noodweer), yang rumusannya 'Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.

2) *NESESITAS*,

Penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi; penggunaan senjata api hanya dapat dilakukan sebagai usaha terakhir dan dapat digunakan jika diperlukan untuk melindungi diri anggota Polisi sendiri, orang sekitar yang tidak bersalah serta untuk memudahkan proses penangkapan. dan jika diperlukan menembak, tembakan harus diarahkan pada bagian tubuh yang paling sedikit mengakibatkan resiko kematian. Karena penangkapan ditujukan untuk membawa tersangka diadili di Pengadilan.

3) *PROPORSIONALITAS*,

Berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan

#### 4) *KEWAJIBAN UMUM*

Anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum; Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) disebutkan, 'Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri'.

#### 5) *PREVENTIF,*

Tindakan Kepolisian mengutamakan pencegahan; Polri mengatur mekanisme dan standar penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian melalui Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1/2009 yang membagi 6 tahapan penggunaan kekuatan, yaitu (1) kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan, (2) perintah lisan, (3) kendali tangan kosong lunak, (4) kendali tangan kosong keras, (5) kendali senjata tumpul atau senjata kimia, dan (6) kendali dengan menggunakan senjata api

#### 6) *REASONABLE masuk akal,*

Tindakan Kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

Selain pelanggaran terhadap aspek-aspek diatas, yang menimbulkan terjadinya kelalaian yang dilakukan aparat Kepolisian adalah karena minimnya latihan, pemberian izin secara sembrono oleh Pimpinan Kepolisian yang terkadang tidak memerhatikan mentalitas aparat pengguna senjata api tersebut, dan disertai pula dengan minimnya senjata alternative yang diberikan instansi Kepolisian.



### 3. Pengertian aparat Kepolisian

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristik, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Kansil, 1986: 351).

Menurut ketentuan dalam UUD 1945 yang berkenaan dengan Kepolisian Negara adalah “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.<sup>8</sup>

Istilah Polisi berasal dari bahasa Belanda *politie* yang mengambil dari bahasa Latin *politia* berasal dari kata Yunani *politeia* yang berarti warga kota atau pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota”. Oleh karena pada jaman itu kota merupakan Negara yang berdiri sendiri. Yang disebut juga Polis, maka Politeia atau Polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan Negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.<sup>9</sup>

Esensi pekerjaan polisi adalah menjalankan kontrol sosial. Dalam struktur negara dan hukum modern sekarang ini, kontrol tersebut menjadi bagian dari

---

<sup>8</sup>Pasal 30 ayat (4) UUD 1945

<sup>9</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>

kontrol sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Sifatnya menjadi birokratis, formal, dan prosedural (Satjipto, 2007: 90).

Hukum memberi kekuasaan yang luas kepada polisi untuk bertindak sehingga polisi memiliki wewenang untuk mengekang masyarakat apabila ada dugaan kuat telah terjadi tindak pidana. Menurut UU Kepolisian no.2 tahun 2002 dalam pasal 18 dijelaskan bahwa polisi diberi wewenang dalam keadaan tertentu untuk melakukan menurut penilaiannya sendiri atau bisa dikenal sebagai kekuasaan diskresi fungsional yang menempatkan pribadi-pribadi polisi sebagai faktor sentral dalam penegakan hukum. Secara lebih rinci pasal 18 UU no.2 tahun 2002 adalah :

- 1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan perundang-undangan dan kode etik Polri (Syamsul, 2007 : 12).

#### ***E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian***

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum dan perundang-undangan tentang kelalaian pengguna senjata api.
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum bagi aparat yang lalai dalam penggunaan senjata api di Pengadilan Negeri Makassar 2008-2014.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kelalaian penggunaan senjata api yang dilakukan oleh aparat Kepolisian.

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi maupun saran sebagai bahan pertimbangan bagi Kepolisian dan Pemerintah dalam menyikapi dan menangani kasus-kasus kelalaian aparat Kepolisian dalam menggunakan senjata api
- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi Kepolisian dan masyarakat.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan bahan penelitian yang akan datang, dan juga sebagai referensi dalam pemberian sanksi terhadap aparat Kepolisian yang melakukan tindak pidana.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Teori Kesalahan

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana; didalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya. Jadi, orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana berarti bahwa dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti yang luas, meliputi:

1. Kesengajaan.
2. Kelalaian/ kealpaan (*culpa*).
3. Dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan (*culpa*). Adapun pengertian kesalahan menurut para ahli, antara lain:

- a. Menurut Simons, kesalahan itu dapat dikatakan sebagai pengertian yang “*social ethisch*”, yaitu:

“Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan jiwa dari si pelaku dan hubungannya terhadap perbuatannya,” dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan jiwa itu perbuatannya dapat dicelakakan kepada si pelaku”.

- b. Menurut Mezger, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pelaku tindak pidana (*Schuld ist der Erbegriiff der Vorraussetzungen, die aus der Strafcact einen personlichen Verwurf gegen den Tater begrunden*).

- c. Menurut Van Hamel, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*Schuld is de verant woordelijkheid rehtens*)”.
- d. Menurut Pompe, pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya . segi dalamnya, yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan. Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:
  - 1. Dari akibatnya, kesalahan adalah hal yang dapat dicela.
  - 2. Dari hakikatnya, kesalahan adalah hal tidak dihindarnya perbuatan melawan hukum.
- e. Menurut Moeljatno, orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dapat dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut.(Teguh Prasetyo 2011:78-80)

Dari pengertian-pengertian kesalahan dari beberapa ahli di atas maka pengertian kesalahan dapat dibagi dalam pengertian sebagai berikut:

#### 1). Kesalahan Psikologis

Dalam arti ini kesalahan hanya dipandang sebagai hubungan psikologis (batin) antara pembuat dan perbuatannya. Hubungan batin tersebut bisa berupa; (a) kesengajaan dan pada (b) kealpaan. Jadi dalam hal ini yang digambarkan adalah keadaan batin si pembuat, sedang yang menjadi ukurannya adalah sikap batin yang berupa kehendak terhadap perbuatan atau akibat perbuatan.

## 2). Kesalahan Normatif

Pandangan yang normatif tentang kesalahan ini menentukan kesalahan seseorang tidak hanya berdasar sikap batin atau hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya, tetapi juga ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian (dari luar) mengenai hubungan antara si pelaku dengan perbuatannya. Saat menyelidiki batin orang yang melakukan perbuatan, bukan bagaimana sesungguhnya keadaan batin orang itu yang menjadi ukuran, tetapi bagaimana penyelidik menilai keadaan batinnya, dengan menilik fakta-fakta yang ada.

Di dalam pengertian ini sikap batin si pelaku ialah, yang berupa kesengajaan dan kealpaan tetap diperhatikan, akan tetapi hanya merupakan unsur dari kesalahan atau unsur dari pertanggungjawaban pidana. Di samping itu ada unsur lain ialah penilaian mengenai keadaan jiwa si pelaku, ialah kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan.

## 3). Unsur-Unsur Kesalahan

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya memuat unsur-unsur, antara lain:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*).
2. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi maka orang atau pelaku yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Oleh karena itu harus diingat bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana) orang yang bersangkutan harus pula dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Kalau ini tidak terpenuhi, artinya jika perbuatannya tersebut tidak melawan hukum maka tidak ada perlunya untuk menerapkan kesalahan kepada si pelaku. Sebaliknya seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan, artinya tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatan itu.

Maka dari itu, kita harus senantiasa menyadari akan adanya 2 (dua) keadaan (yang saling berpasangan dan terkait) dalam syarat-syarat pemidanaan ialah adanya:

1. Dapat dipidananya perbuatan, atau memenuhi sifat melawan hukum (*strafbaarheid van het feit*).
2. Dapat dipidananya pelaku atau terpenuhinya unsur kesalahan (*strafbaarheid van de persoon*).

## **B. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup><http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>



Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat Undang-Undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.<sup>3</sup>

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, didalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatan yaitu.

Didalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri,itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak

---

<sup>2</sup>Hamzah Hatrik, SH. MH. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo, 1996, hal 11

<sup>3</sup>Djoko Prakoso, SH. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1987. Hal 75

pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.<sup>4</sup>

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.<sup>5</sup> Orang yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.<sup>6</sup>

### C. Etika dan Kode Etik Kepolisian

Membahas tentang etika dan kode etik Kepolisian sudah sangat jelas kedua hal ini telah tertuang kedalam Undang-Undang No.22 tahun 2002 tentang Kepolisian dan Perkap Polri No.14 tahun 2011, yang dimana aturan ini mengatur segala tingkahlaku anggota Kepolisian Republik Indonesia tanpa terkecuali.

Perkap Polri ini bertujuan ; Menerapkan nilai-nilai tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian, memantapkan profesionalisme, integritas, akuntabilitas, dan menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak anggota Polri, serta menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas dan tak lupa memuliakan profesi Polri itu sendiri.<sup>7</sup>

Dalam Perkap ini, mengatur segala bentuk tentang kode etik dan etika anggota Kepolisian, seperti, etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian.

<sup>4</sup>NaskahRancanganKUHPBaruBukuIdanIITahun2004/2005(penjelasan).

<sup>5</sup>DR. Andi Hamzah, SH. *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hal.131

<sup>6</sup>W.P.J. Pompe, op.cit hal. 190

<sup>7</sup>Google search, *Perap Polri No.14 tahun 2011*, Pasal 2, diakses (13 nov 2014)

#### ***D. Faktor Timbulnya Kelalaian Aparat dalam Menggunakan Senjata Api***

Kurangnya tindakan profesionalitas, proporsionalitas, dan kurangnya pelatihan terhadap aparat Kepolisian dan tanpa adanya pemeriksaan mental menjadi faktor utama seringnya terjadi tindak pidana yang dilakukan aparat Kepolisian,

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwasanya aparat Kepolisian sebelum mendapat izin penggunaan senjata api, mesti wajib melalui berapa tahap penyeleksian, dari sinilah celah yang terkadang disepelekan oleh Pimpinan Kepolisian dalam memberikan amanah terhadap bawahannya.

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain diatur dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 8/2009”), serta di dalam Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (“Perkapolri 1/2009”).

Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka (Pasal 8 ayat [2] Perkapolri 1/2009).

#### ***E. Penerapan Sanksi terhadap Aparat yang Melakukan Tindak Pidana Sesuai Perundang-Undangan.***

Di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tidak lagi diatur tentang ketentuan/sanksi pidana terhadap tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia begitu juga sanksi 34/16 tentang prinsip-prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api tidak ada diatur tentang sanksi/ ketentuan pidana dari penggunaan senjata api yang tidak

sesuai dengan prosedur di dalam resolusinya hanya diatur tentang penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan pelanggaran pidana dan harus diproses di pengadilan umum.

Bagi anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin dikenakan sanksi disiplin. Mengenai sanksi disiplin diatur dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dalam Pasal 7, 8 dan 9 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Pasal 7 : *“Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran disiplin anggota kepolisian Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan atau hukuman disiplin”.*

Pasal 8 : (1) *Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau teguran fisik*  
(2) *Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ansum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.*

Pasal 9 : *Hukuman disiplin berupa :*

- a. Teguran tertulis*
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun*
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala*
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun*
- e. Mutasi yang bersifat demosi*
- f. Pembebasan dari jabatan*

*g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.<sup>8</sup>*

Bagi anggota Polri yang tidak terlibat kasus tindak pidana selain diadili dalam lingkungan peradilan umum, tentu saja ada penerapan sanksi yaitu pemberhentian dari dinas kesatuan Polri. Mengenai Pemberhentian Dari Kesatuan dinas diatur dalam PP No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam PP No. 1 Tahun 2003 bab III diatur mengenai pemberhentian tindak pidana dengan hormat pada Pasal 11 dan 12 ayat (1) sub a dan ayat (2) sebagai berikut :

*Pasal 11 :Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila;*

*a. Melakukan tindak pidana*

*b. Melakukan pelanggaran*

*c. Meninggalkan tugas atau hal lain*

*Pasal 12: ayat 1 (satu) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia apabila:*

*Sub a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Anggota Kepolisian Republik Indonesia*

---

<sup>8</sup>Roslan Silaban, *Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Aparat Polri* (Medan: FH USU, 2008) h.84.

*Ayat 2 (dua) pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.*

## **F. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual ini menjelaskan pengertian – pengertian dari istilah-istilah yang akan ditulis dalam penulisan ini guna membatasi ruang lingkup dalam penulisan, memberikan persepsi yang sama tentang istilah yang dipakai dalam penulisan yaitu:

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Ditinjau dari segi juridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang. Ditinjau dari segi sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
2. Senjata api (bahasa Inggris: firearm) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata\\_api](http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api) diakses 7 Juni 2014 pukul 13.00 Wita.

3. Untuk menambah kestabilan lintasan Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan Pengadilan bertugas sebagai penyidik. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Kansil, 1986: 351).





UU No. 2 Tahun 2002 menjelaskan secara umum tugas dan wewenang Kepolisian disertai dengan tujuan serta fungsi sebagai seorang aparat penegak hukum, menyangkut permasalahan yang ada pada penulisan ini lebih mendalam membahas mengenai aturan-aturan yang secara khusus mengikat anggota Kepolisian dalam izin penggunaan senjata api serta sanksi ketika melakukan kelalaian dalam menggunakan senjata api, yang sebagai mana dijelaskan pada Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang penggunaan senjata api, serta PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Aturan diatas bertujuan untuk menciptakan iklim disiplin Kepolisian serta secara umum untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia, Terwujudnya sistem hukum yang baik bagi masyarakat dan anggota Kepolisian serta meningkatkan kedisiplinan Aparat penegak hukum.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian dan Kualitatif Normatif. Jenis penelitian ini mengandalkan teknik pengumpulan data dari putusan yang dikeluarkan pengadilan menyangkut kasus yang terdapat pada penulisan skripsi ini dan disertai dengan dokumentasi dan didukung dengan berbagai macam literatur-literatur bacaan yang menyangkut tentang pokok permasalahan dalam penelitian ini.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar dengan mengumpulkan putusan dari kasus yang menyangkut tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh aparat Kepolisian.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian hukum normative. Langkah pertama yang dilakukan penelitian hukum normative yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemakaian instrument Undang-Undang tentang aparat Kepolisian serta aturan penggunaan senjata api. Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini. Penelitian bertujuan menemukan fakta hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen

disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.<sup>1</sup>

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup sebagai berikut:

1. Data Primer merupakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang etika dan kode etik Kepolisian, serta PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia,
2. Data Sekunder, antara lain berupa hasil wawancara dari pihak Pengadilan dan dokumen putusan nomor 49 tahun 2013

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Sehubungan dengan pendekatan penelitian diatas, teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan cara mengunjungi langsung Pengadilan Negeri Makassar dan mengumpulkan putusan yang menyangkut permasalahan pada penulisan skripsi ini.

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya-jawab terhadap pihak Kepolisian.
3. Dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk bahan dukungan untuk menambahkan serangkaian hasil dari teknik lain guna mempertegas hasil penelitian.

---

<sup>1</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h.13

#### ***D. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian adalah merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara, untuk menilai keadaan seseorang;
2. Observasi, mengadakan pengamatan secara langsung;
3. Dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dll

#### ***E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Penulisan ini, Data yang diperoleh kemudian di kumpulkan baik secara primer maupun sekunder, dan di analisis secara mendalam. Selanjutnya diajukan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan ini. Dalam menguji data dan materi yang disajikan, diperlukan metode sebagai berikut:

1. Deduktif yang pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang – undangan.
2. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip atau memperjelas bunyi peraturan perundang – undangan dan uraian umum Komperatif yang pada umumnya digunakan dalam membandingkan perbedaan pendapat , terutama terhadap materi yang mungkin dapat menimbulkan ketidaksepahaman serta menimbulkan kerancuan.

### ***F. Pengujian Kebasahan Data***

Dalam menguji data dan materi yang disajikan, dipergunakan metode sebagai berikut:

1. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum;
2. Komperatif yang pada umumnya digunakan dalam membandingkan perbedaan pendapat terutama terhadap materi yang mungkin dapat menimbulkan ketidaksepahaman serta dapat menimbulkan kerancuan;
3. Deduktif dan Induktif . Deduktif tolak ukurnya adalah peraturan perundang-undangan dan Syariat Islam, sedangkan induktif adalah dalam menyusun logika untuk mengambil kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor/1149/Pid.B/2013/PN.Mks.**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara biasa, yang bersidang secara majelis, memutuskan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: ISAK TIRANDA
Tempat Lahir	: Toraja
Umur/Tanggal Lahir	: 35 tahun/ 28 Agustus 1978
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Asrama Polisi Bhayangkara Jl Kumala No.146
Agaam	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Polri
Pendidikan	: SMA

Terdakwa dihadapkan kedalam persidangan oleh Penuntut Umum dan memberikan keterangan :

- a. Terdakwa merupakan anggota Polisi resimen 3 Pelopor kelapa dua Jakarta, dengan pangkat briptu, dan sekarang bertugas pada Polrestabes Makassar Polda Sul-sel
- b. Terdakwa menjelaskan tentang keluarganya secara menyeluruh.

- c. Terdakwa memaparkan kronologis kejadian penembakan oleh dirinya sendiri didalam persidangan.
- d. Terdakwa memberikan alasan yang memicu segala bentuk tindak pidana yang dia lakukan terhadap korban.
- e. Dalam persidangan terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban.

Terdakwa dengan keterangan diatas dalam persidangan didampingi oleh Tim Kuasa Hukum :

1. NUH. SYARIF HAMZAH, S.H
2. MAKKAH HM, S.H
3. ANDI FALAQ, S.H
4. ANDRI HIDAYAT, S.H
5. NUR FALAQ, S.H
6. BUDIMINZATHU, S.H
7. RESDIANTO WILLIEM, S.H LLM.
8. ANZAR MAKKUASA, S.H.,M.H
9. AMINUL RAHMAN, S.H
10. AGUS HAIKAL, S.H
11. ADI SUCOPO JUANA, S.H
12. AHMAD BASKAM, S.H.,M.H

Pengadilan Negeri Makassar Melalui Penuntut Umum memberikan dakwaan terhadap terdakwa yang bersifat “subsidiaritas”, Yakni :

1. Dakwaan Primer: Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP;



2. Dakwaan Subsidair: Perbuatan terdawa diduga melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP;
3. Dakwaan Lebih Subsidair: Perbuatan terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 355 Ayat (1) KUHP;
4. Dakwaan Lebih Subsidair Lagi: Perbuatan terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 35 Ayat 1 KUHP;
5. Dakwaan Lebih Lebih subsidair Lagi: Perbuatan terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 356 Ayat 2 KUHP;
6. Dakwaan Lebih Lagi Lebih Subsidair Lagi: Perbuatan terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat 2 KUHP;

Dari hasil tuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, Tim kuasa hukum terdakwa mengajukan Eksepsi atau keberatan di depan persidangan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2013, dengan pokok pernyataan sebagai berikut ;

1. Menyatakan bahwa menerima dan mengabulkan nota keberatan (eksepsi) terdakwa Isak Tiranda ;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan bahwa proses pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan dihentikan;
4. Menyatakan bahwa terdakwa Isak Tiranda tidak dapat dipersalahkan dan dihukum berdasarkan atas surat dakwaan yang batal demi hukum tersebut ;

5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti kepada terdakwa ;
6. Memulihkan nama baik dan hak terdakwa Isak Tiranda pada keadaan semula ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Dari Eksepsi terdakwa, Penuntut Umum didepan persidangan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 telah mengajukan tanggapan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Menolak seluruh materi Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Isak Tiranda ;
2. Menerima Dakwaan Penuntut Umum dan melanjutkan proses persidangan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Isak Tiranda ;

Atas pertimbangan Eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum atas Eksepsi dari terdakwa, Majelis Hakim dalam Putusan Sela, yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi Terdakwa Isak Tiranda tidak dapat diterima ;
2. Menetapkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2012-2013, atas nama Terdakwa Isak Tiranda yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 29 Juli 2013, dapat dijadikan dasar pemeriksaan ini ;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan ;
4. Menangguhkan penetapan biaya perkara pada putusan akhir ;

Setelah Majelis Hakim memberikan putusan sela, Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, Sebagai berikut :

a. Saksi ke-1 atas nama Hasmawati

Saksi adalah Humas pada RS.Bhayangkara Makassar, menyatakan bahwasanya saksi korban adalah Pimpinan pada RS.Bhayangkara, saksi pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013, sekitar pukul 11.00 WITA, saksi melihat terdawa berada didepan ruangan kerja sambil berteriak-teriak dan marah-marah, sehingga saksi memanggil terdakwa bersama istrinya masuk kedalam ruangan kerja untuk menghindari perhatian dari orang-orang yang berada di rumah sakit.

Terdakwa menyampaikan maksudnya ingin bertemu dengan saksi korban, saksi melihat terdawa dalam keadaan emosi, maka saksi meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan senjata api yang dibawa pada saat itu.

Saksi lalu menyampaikan kepada terdakwa bahwa karumkit sedang rapat, saksipun mendengar terdakwa dan istrinya membicarakan masalah lobang galian di area pekarangan rumah terdakwa dan yang ditakutkan terdakwa jangan sampai anak terdakwa terjatuh kedalam lobang tersebut, terdakwa yang sempat menutup lobang tersebut menimbulkan kemarahan dari saksi korban. Terdakwa bersama istrinya kemudian meninggalkan ruangan kerja saksi.

Pada hari yang sama sekitar pukul 15.45 WITA, saksi mendapatkan informasi dari AKBP Sanggayang mengatakan bahwa saksi korban kena tembak.

b. Saksi ke-2 atas nama Sangga Rudiyatmika

Sangga Rudiyatmika yang merupakan petugas bagian radiologi membenarkan seluruh keterangan saksi Hasmawati yang terdapat pada berita acara penyidikan.

Saksi tidak mengenal terdakwa namun saksi mengenal saksi korban sebagai karumkit Bhayangkara Makassar, saksi sempat mendengar terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak terima dengan adanya lobang galian didepan rumah terdakwa, pada saat itu saksi mendengar bahwasanya konsultan pengawas memberikan solusi yang tidak diterima terdakwa, dan terdakwa ingin bertemu dengan saksi korban untuk membicarakan hal tersebut, tetapi saksi menyampaikan kepada terdakwa kalau saksi korban sedang rapat dan belum bisa ditemui.

Saksi berusaha untuk tidak mempertemukan terdakwa dengan saksi korban karena padasaat itu terdakwa dalam keadaan emosi, apalagi pada saat itu saksi melihat kalau terdakwa membawa senjata api, tidak lama kemudian terdakwa meminta izin untuk pulang kerumah, saksi mengantar keluar ruangan melalui ruang perawatan garuda.

Pada pukul 15.25 WITA, saksi mendengar suara tembakan, kemudian saksi dihubungi oleh saksi Tasrun, bahwa karumkit tertembak dan sudah berada di ruang Instalasi Gawat Darurat RS.Bhayangkara, setelah saksi berada di ruang IGD, saksi melihat terdapat luka tembak dibagian leher dan paha saksi korban.

c. Saksi ke-3 atas nama H.Andi Malombasang

Saksi bertugas dibagian keamanan di RS.Bhayangkara Makassar, seluruh keterangan saksi yang pernah saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar seluruhnya.

Pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013, sekitar pukul 15.15 WITA, bertempat diruangan piket, terdakwa menyampaikan bahwasanya ingin bertemu dengan saksi korban.

Saksi menyampaikan kepada terdakwa untuk bertemu dengan pimpinan harus menitipkan senjata di piket, tapi terdakwa menolak, saksipun bersama

dengan saksi AKBP Ambo Jenne menasehati terdakwa, bahwa menghadapi pimpinan tidak boleh emosi.

Saksi kemudian masuk ke ruangan saksi korban dan melaporkan bahwa terdakwa mau bertemu dengan saksi korban, dan saksi korban menjawab “tunggu 15 menit, karena masih sedang berlangsung rapat”

Sekitar 15 menit kemudian, terdakwa dipanggil untuk bertemu dengan karumkit oleh saksi Sudarmin dan terdakwapun masuk kedalam ruang rapat.

Pada saat itu yang berada dalam ruangan rapat adalah saksi korban, saksi Sudarmin, saksi Abdul Rahman dan saksi Tasrun.

Terdakwa didampingi oleh AKBP Ambo Jenne dan duduk di kursi berhadapan dengan karumkit.

Saksi mendengar pembicaraan antara terdakwa dengan saksi korban, terdakwa mengatakan : “apa betul saya mau dikubur di lobang pondasi?”, saksi korban menjawab : “betul saya ngomong seperti itu” sambil menjelaskan: “kenapa lobang ditutup tanpa seizing rumah sakit?”, kemudian terdakwa mengatakan : “kalau anak saya jatuh dilobang dan meninggal..?” saksi korban menjawab: “lobang itu kan mau ditutup dan anakmu tidak meninggal”, terdakwa kemudian mengatakan: “saya tidak terima kalau anak saya dibegitukan”, dijawab oleh saksi korban : “kalau anakmu meninggal kan ada kamar jenazah”, terdakwa berdiri dan mengatakan : “saya tidak terima” sambil meninggalkan ruang rapat.

Tidak lama kemudian terdengar suara tembakan dari pintu masuk sebanyak satu kali, kemudian terdakwa masuk kedalam ruang rapat sambil mencari saksi korban, kemudian saksi lalu berlari masuk dan bersembunyi kedalam kamar mandi, saat berada di dalam kamar mandi, saksi mendengar suara tembakan sebanyak dua kali, tak lama kemudian saksi melihat dengan cara mengintip, ternyata saksi korban berada di lantai dalam posisi merangkap,

kemudian saksi bertanya kepada saksi korban. ”bagaimana komandan.. baik – baik” saksi korban menjawab: “bawa saya ke IGD”, lalu saksi bersama dengan saksi AKBP Ambo Jenne mengangkat saksi korban dan membawa saksi korban ke IGD

d. Saksi ke-4 atas nama Sudarmin

Saksi tidak mengenal terdakwa, sedangkan dengan saksi korban, saksi mengenalnya, sebab saksi korban adalah atasannya. Saksi Sudarmin memaparkan bahwa jarak antara dirinya dengan saksi korban hanya sekitar 20cm dan dipindahkan oleh tripleks

Dalam posisi tiarap saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 kali, menurut perhitungan saksi jarak tembakan dengan saksi hanya sekitar 2 meter, sekitar 5 menit setelah terdengarnya suara tembakan saksi lalu keluar dari kolom meja dan melihat saksi korban dalam keadaan berdarah dengan posisi tertelungkup dibawah meja, saksi korban kemudian dibawa ke IGD untuk mendapatkan pertolongan, selanjutnya saksi korban dirujuk ke rumah sakit DR. Wahidin, kemudian dirujuk lagi ke rumah sakit Pelamonia Makassar, saksi korban mengalami luka pada jari manis dan punggung kanan, setelah kejadian tersebut saksi korban lalu dimutasi ke pusdokkes polri di Jakarta, dan sekarang ini korban sudah bisa berjalan, tetapi mengalami cacat permanen pada jari manis.

e. Saksi ke-5 Abdul Rahman

Saksi Abdul Rahman melihat terdakwa mengarahkan senjata kepada saksi korban lalu menembakkannya, pada saat itu saksi hanya mendengar suara tembakan hanya satu kali, karena setelah penembakan tersebut saksi berusaha keluar dari ruangan dengan cara mengendap-ngendap, pada saat penembakan, saksi melihat langsung, karena posisi saksi tepat berada di depan Terdakwa.

f. Saksi ke-6 (saksi korban) Dr. Purwadi, MS, Mars

Saksi pada saat mendengar suara tembakan, kemudian saksi bersembunyi di kolom meja dengan posisi tengkurap, terdakwa lalu menembak saksi sebanyak 2 kali mengenai bagian leher dan paha kiri yang dilakukan secara beruntun.

Dari ke Enam saksi yang memberikan kesaksian didalam persidangan termasuk saksi korban sendiri, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi mengenai proses terjadinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa, hanya keterangan saksi korban ( Dr. Purwadi, Ms, Mars) saja yang kemudian di konfirmasi oleh terdakwa dan diberikan tanggapan sebagai berikut ;

- a. Keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar
- b. Terdakwa melakukan penembakan karena terdakwa sangat emosi dan marah karena saksi telah melecehkan harkat dan martabat terdakwa yang menyatakan: “ kalau anak kamu mati, kan ada kamar mayat disitu”
- c. Atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal dan meminta maaf kepada Saksi korban

Selain Saksi, Penuntut Umum dalam menguatkan tuntutananya, juga menghadirkan saksi ahli, keterangan berkas pemeriksaan psikologi dari terdakwa serta barang bukti kedalam persidangan.

a. Ahli AKP dr. Mauluddin, M.Sp.F

Ahli kenal dengan saksi korban karena saksi korban adalah atasan Ahli yang menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Bhayangkara, Terdakwa Isak Tiranda adalah suami dari Saksi Jenny yang juga bertugas sebagai perawat di Rumah Sakit Bhayangkara

Sesuai dengan hasil pemeriksaan ahli berdasarkan perlakuan yang dialami oleh saksi korban, ditemukan 2 buah alur luka tembak yaitu:



1. Terdapat 1 buah luka tembak masuk dengan kelim lecet episentris (masuk miring) dan tidak ditemukan jejas mesiu (sesuai luka tembak jarak jauh ukuran diatas 60 cm) pada daerah jari manis tangan kiri dan alur berlanjut dengan 1 buah luka tebak luar pada bagian belakang tangan jari keempat tangan kiri, kemudian alur luka tembak berlanjut dengan terdapat 1 buah luka tembak masuk lagi pada daerah leher kiri (*regio cervical/ neck sinistra*) bagian bawah belakang dan terdapat proyektil yang bersarang di dalam tubuh pada daerah belakang tulang belikat kanan bagian lekuk atas
2. Terdapat 1 buah luka tembak masuk dengan kelim lecet episentris (masuk miring) dan tidak ditemukan jejas bubuk mesiu (sesuai luka tembak jarak jauh ukuran diatas 60 cm) pada daerah paha kiri sisi depan tengah dan alur berlanjut dengan sebuah luka tembak keluar pada paha kiri sisi atas dalam, kemudian alur luka tembak berlanjut dengan terdapat satu buah luka tembak masuk lagi pada daerah selangkangan kiri (*Regio Ingunal Sinistra*) dan proyektil bersarang didalam tubuh pada daerah kepala tulang paha kanan sisi dalam.
3. Ahli juga mengemukakan bahwasanya teradapat dua kerusakan permanen yang diderita oleh korban tapi tidak mengakibatkan resiko kematian dikarenakan kedua alur proyektil yang dikeluarkan terdakwa tidak mengenai bagian fatal dari korban, selain itu terdakwa dalam menembakkan proyektil tidaklah membidik kearah yang vital tetapi hanya menembak dengan sasaran yang tidak ditentukan, jika terdakwa bertujuan untuk membunuh, dia akan menembakkan kearah vital korban.

Setelah keterangan saksi ahli, penasehat hukum terdakwa menghadirkan saksi yang dapat meringankan terdakwa (saksi a de car'de), seluruh kesaksian yang diberikan saksi a de car'de dibenarkan oleh terdakwa.

Guna memperkuat lagi dakwaan dari Penuntut Umum, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yang isininya menjelaskan:

1. Laporan pemeriksaan psikologi sodara terdakwa oleh Psikolog R. Guna Dharmawan, Psi, pada pokok kesimpulannya . bahwa terdakwa pada dasarnya adalah pribadi yang baik, namun memiliki kelemahan dalam kemampuan berpikir solusi, urang mampu bersikap terbuka terhadap orang lain dan kurang memiliki dorongan kemanusiaan, dengan karakter tersebut terdakwa dalam menghadapi masalah kurang ada upaya untuk mendapatkan solusi dari lingkungannya, adanya agresi bernada provokasi oleh terdakwa dianggap sebagai ancaman bagi keselamatan diri dan keluarganya. Kondisi demikian membuat terdakwa dengan cepatnya memutuskan untuk memusnahkan sesuatu yang dianggapnya sebagai ancaman.
2. Visum Et Repertum Nomor : VER/ 22/ IV/ 2013/ Rumkit, tanggal 8 april 2013, menerangkan secara jelas luka tembak yang diderita oleh korban secara detail.
3. Barang bukti yang dihadirkan penuntut umum dalam persidangan antara lain :
  - a. 1 buah pecahan proyektil yang ditemukan dilantai ruangan RS Bayangkara.

- b. 1 buah senjata api merek Revolver 38 spesialis Taurus No. Seri 218382 Polri XJ 229158 Made in Brazil
- c. 3 buah slongsong peluru
- d. 2 buah peluru yang masih aktif
- e. 1 lembar baju batik kemeja putih berlengan pendek bermerk madani
- f. 1 buah lembar celana panjang warna hitam biru dan ikat pinggang.
- g. 1 lembar baju dalam warna putih.

Barang bukti yang tersebut diatas sebelumnya telah dilakukan tindakan penyitaan oleh penyidik dan tindakan penyitaan tersebut telah disetujui oleh ketua Pengadilan Negeri Makassar, dan barang bukti tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutuskan perkara.

Selanjutnya Penuntut Umum membacakan notauntutannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiyayaan berat”, dan diancam pidana pasal 354 ayat 1 KUHP, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun, dan membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan nota tuntutan dari Penuntun Umum, terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan nota pembelaan kepada majelis hakim yang berisikan 3 pokok pembelaan sebagai berikut :

- a. Tentang jalannya proses persidangan

Terdapat ketidakserasian antara huruf a dan b pada pasal 160, kedua ketentuan ini tidak sejalan dan tidak sistematis, dan dari apa yang terjadi dalam persidangan, penasehat hukum terdakwa mengatakan bahwa saksi korban kurang

memberikan rasa hormat terhadap jalannya sidang dikarenakan mengulur-ngulur waktu/proses jalannya pemeriksaan persidangan.

Terdakwa saat mengikuti proses persidangan dan pemeriksaan telah bersikap sopan, kooperatif, dan tidak membuat saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum merasa tertekan dan tidak bebas dalam memberikan keterangannya dihadapan Majelis Hakim.

Dalam nota pembelaan poin pertama juga berisikan bahwasanya, saksi korban hanya menyampaikan secara lisan bahwa dirinya mengalami trauma dan ketakutan tanpa adanya bukti yang mendukung dari pemeriksaan seorang psikiater terhadap diri saksi korban, dan sebagai anggota polisi tentunya saksi korban meklum betul bahwa “seorang anggota polisi dituntut siap menerima resiko apapun yang terjadi dalam menjalankan tugasnya”.

- b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kabur dan tidak cermat dalam menerapkan pasal 354 ayat (1) KUHP

Dari fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi dari bukti surat yang diajukan dalam perkara ini laporan pemeriksaan psikologi terhadap terdakwa, tidak bersesuaian dengan unsur-unsur pasal yang dituntut Jaksa Penuntut Umum karena fakta persidangan terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatannya dan tidak mempunyai maksud dan tujuan terlebih dahulu untuk membuat luka berat ditubuh saksi korban

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pasal 354 ayat 1 KUHPidana dalam dakwaan lebih subsidair lagi adalah kabur, karena faktor-faktor persidangan lebih condong ke arah pasal 351 ayat 2 KUHPidana dalam dakwaan lebih lagi lebih subsidair lagi

- c. Agar kiranya Majelis Hakim Mempertimbangkan Hal-hal yang memberatkan dan meringankan, agar dapat menjadi bahan acuan guna meringankan hukuman terdakwa.

Penasehat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya memberikan bahan pertimbangan kepada majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dapat meringankan hukuman terdakwa dengan memerhatikan hal-hal berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan :

Pernyataan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan poin IV adalah kabur, sebab perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan yang meresahkan masyarakat, dimana perbuatan spontanitas terdakwa timbul dari akibat perkataan saksi korban yang sangat melecehkan harkat dan martabat serta merasa terancam. Kita semua tahu bahwa terdakwa bukanlah seorang kriminal dan tidak pernah terlibat dalam kejahatan

2. Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa telah meminta maaf kepada korban, akibat dari perbuatan terdakwa terhadap korban telah dimaafkan dan korban juga telah meminta maaf atas perkataannya yang menjadi sebab dari adanya perbuatan terdakwa

Terdakwa juga memiliki tanggung jawab keluarga, dimana terdakwa mempunyai anak-anak yang masih balita dimana dalam proses tumbuh kembang anak tentunya dibutuhkan kehadiran seorang ayah disamping mereka. (Vide UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak).

Terdakwa adalah anggota POLRI sejak tahun 1999 dan pada tahun 2000 terdakwa ditempatkan di resimen 3 pelopor kelapa 2 dan pernah

mendapat penghargaan, dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan pidana sebelumnya.

Dalam nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum terdakwa, ti penasehat hukum terdakwa mengajukan agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- a. Meyatakan menerima dan mengabulkan nota pembelaan (pledoi) terdakwa Isak Tirnada
- b. Menyatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum kabur dan tidak cermat dalam menerapkan pasal, dikarenakan korban telah mengakui akibat perbuatan terhadap diri saksi korban, maka kami berharap agar kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang telah kami uraikan dalam nota pembelaan (pledoi) kami serta memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa.
- c. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Dari nota pembelaan penasehat hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Replik atau tanggapan secara tertulis, namun secara lisan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menolak Nota pembelaan tersebut dan tetap dengan Reqositoir atau Nota tuntutan.

Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, penasehat hukum terdakwa juga langsung menanggapi secara lisan, yang menyatakan menolak Reqositoir atau nota tuntutan dan tetap pada nota pembelaan semula.

Analisis Majelis hakim dalam mengambil keputusan dalam persidangan adalah sebagai berikut :

1. Menimbang, Bahwa menurut penilaian majelis Hakim nota pembelaan penasehat hukum terdakwa pada angka I (satu) ke- 1, dinyatakan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak
2. Menimbang, bahwa terhadap alasan nota pembelaan penasehat hukum pada angka I (satu) ke- 2, dipertimbangkan sebagai berikut :  
menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 173 KUHAP, majelis hakim berpendapat permohonan saksi korban telah beralasan hukum, sebab demi untuk memperoleh keterangan yang objektif, mengingat terdakwa didepan persidangan juga di wakili oleh tim penasehat hukum, menurut penilaian majelis hakim tidak diperlukan keterangan psikiater lebih dahulu yang menyatakan saksi korban trauma, maka nota pembelaan tim penasehat hukum terdakwa angka I (satu) ke- 2, dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga ditolak
3. Menimbang, bahwa dari keterangan seluruh saksi, di hubungkan dengan bukti surat, serta keterangan terdakwa, dan barang bukti dan petunjuk berupa persesuaian antara alat bukti dengan alat bukti lainnya dan persesuaian alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang telah teruraikan pada penjelasan-penjelasan saksi dan barang bukti di atas.
4. Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas majelis hakim akan mempertimbangkan apakah atas diri dan perbuatan terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum tersebut ?



5. Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhi pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah lebih dahulu dibuktikan tentang tindak pidana (delict) atau perbuatan melawan hukumnya(wederrechtliijk) yang merupakan actus reus, dan selanjutnya harus dibuktikan lagi apakah atas diri dan perbuatan terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang merupakan mesn rea
6. Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana (delict) atau perbuatan melawan hukum (wederrechtliijk), maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya
7. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka majelis hakim lebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer, apabila dakwaan primer terbukti maka dakwaan subsidair dan dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan
8. Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan dakwaan primer, yakni perbuatan terdakwa diduga melanggar ketentuan pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
  - a. Barang Siapa : menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah semua subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (Naturalijk Persoon) dan badan hukum (Rechts Persoon)

Karena subjek hukum dalam hal ini adalah orang (natureliijk person) yakni terdakwa Isak Tiranda yang didakwa melakukan

tindak pidana melanggar ketentuan pasal 340, Jo 53 KUHPidana, maka esensi unsur ini adalah dari perbuatan percobaan menghilangkan nyawa lain yang direncanakan terlebih dahulu, maka ketentuan pasal 340, Jo pasal 53 KUHPidana adalah delik materil, sehingga untuk membuktikan unsur barang siapa pasal 340, Jo pasal 53 KUHPidana lebih dahulu harus dibuktikan unsur berikutnya, yakni unsur percobaan menghilangkan nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu dengan direncanakan terlebih dahulu terbukti, maka dengan sendirinya unsur barang siapa dalam ketentuan pasal 340, Jo pasal 53 KUHPidana menjadi terbukti pula atau sebaliknya apabila unsur percobaan menghilangkan nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu dengan direncanakan terlebih dahulu tidak terbukti, maka unsur barang siapa dalam hal ini menjadi terbukti

- b. Percobaan menghilangkan nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu : menimbang, bahwa dalam delik kejahatan percobaan menghilangkan nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, harus dilakukan dengan opzet atau dengan sengaja.
9. Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan penembakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bukan merupakan percobaan yang dikehendaki untuk menghilangkan nyawa saksi korban yang direncanakan lebih dahulu, maka unsur percobaan menghilangkan nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi dari perbuatan terdakwa
10. Menimbang, bahwa unsur percobaan menghilangkan nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi, dengan sendirinya

unsur “barang siapa” juga tidak terpenuhi, oleh karenanya itu unsur-unsur ketentuan pasal 340, Jo 53 KUHPidana dalam dakwaan primer penuntut umum tidak terbukti, maka terdakwa Isak Tiranda tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan menghilangkan nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu” dengan demikian terdakwa Isak Tiranda dinyatakan bebas dari dakwaan primer penuntut umum

11. Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yakni perbuatan terdakwa diduga melanggar ketentuan pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP, yang unsurnya sama halnya dengan unsur yang terdapat pada dakwaan primer, dan dari analisis majelis hakim terhadap pasal dakwaan subsidair tidak memenuhi unsur, maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan menghilangkan nyawa orang lain
12. Pertimbangan hakim dalam dakwaan lebih subsidair, yakni pasal 355 ayat 1 yang delik inti dari ketentuan pasal ini adalah penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu, maka majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu tidak terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan lebih subsidair penuntut umum.
13. Menimbang, bahwa dakwaan lebih subsidair lagi, yakni perbuatan terdakwa diduga melanggar ketentuan pasal 354 ayat 1 KUHPidana tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat tidak memenuhi unsur, maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana dan dinyatakan bebas dari dakwaan lebih subsidair lagi

14. Menimbang, bahwa dakwaan lebih lebih subsidair lagi, yakni perbuatan terdakwa diduga melanggar ketentuan pasal 356 ayat 2 KUHPidana yang delik inti dari ketentuan pasal ini adalah penganiayaan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah, tidak memenuhi unsur dalam ketentuan pasal tersebut, dengan demikian terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dinyatakan bebas dari dakwaan lebih lebih subsidair lagi
15. Menimbang, bahwa dakwaan lebih lebih subsidair lagi tidak terbukti, majelis hakim kemudian mempertimbangkan dakwaan lebih lagi lebih subsidair lagi yaitu pasal 351 ayat 2 dengan delik inti penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka berat, dan oleh karena unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan ini terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
16. Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini digelar dipersidangan, majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta sebagai alasan-alasan pembenaran ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut, yang merupakan mansrea, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya.
17. Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur

ketentuan dalam pasal 351 ayat 2 KUHPidana dan tidak ditemukannya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf atas diri dan perbuatan terdakwa, maka majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Isak Tiranda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka berat”, dan karena perbuatannya itu maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya.

18. Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan nota pembelaan sodara terdakwa yang bentuk pembelaanya termasuk kategori permohonan (*clementie*), yang berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis yang tercermin pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pembelaan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan majelis Hakim terutama pada angka III nota pembelaan tersebut. Akan tetapi pada angka III ke-5 dinyatakan tidak berdasar oleh majelis Hakim.
19. Setelah membaca, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Berkas perkara, surat dakwaan, dan dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti dan barang bukti, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap sodara terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan, dengan memerhatikan pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan segala ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang-Undang RI No.08 tahun 1981, tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### MENGADILI

1. Meyatatakan terdakwa Isak Tiranda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :”Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka berat”
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan pidana tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa menjalani masa penahanan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti, berupa : 1 buah senjata api merek revolver 38 spesial Taurus no. seri 218382 polri XJ 229158 made in Brazil dan 2 (dua) buah peluru yang masih utuh (aktif), dikembalikan kepada pemiliknya negara republik Indonesia Cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia,Cq. Propam Polrestabes Makassar melalui terdakwa. Barang bukti berupa : 1 buah pecahan proyektil, 3 buah selongsong peluru, 1 lembar baju batik kemeja berlengan pendek merk madani, 1 buah lembar celana panjang warna hitam biru dan ikat pinggang, 1 lembar baju dalam putih , disita untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan terdakwa dibebani lagi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

### **B. Pertimbangan Hukum Materil dan Formil Putusan Nomor/1149/Pid.B/2013/PN.Mks.**

#### **1. Pertimbangan Hukum Materil**

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang bersifat “Subsidiaritas”, yakni :

**a. Dakwaan primer : perbuatan terdakwa diduga melanggar ketentuan pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP;**

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan dakwaan primer, yakni perbuatan terdakwa diduga melanggar ketentuan **pasal 340 KUHP Jo pasal 53 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah semua subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (Naturelijk Persoon) dan Badan hukum (Rechts Persoon)

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam hal ini adalah orang (Naturelijk Persoon) yakni terdakwa Ishak Tiranda yang didakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 340, Jo pasal 53 KUHPidana

Menimbang, bahwa inti delik (Delicts Bestanddelen) dari ketentuan pasal 340, Jo pasal 53 KUHPidana adalah percobaan menghilangkan nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, maka essensi unsur ini adalah akibat dari perbuatan percobaan menghilangkan nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, maka ketentuan pasal 340, Jo 53 KUHPidana adalah delik materil.

**Ad.2. Unsur “Percobaan Menghilangkan Nyawa Orang Lain yang Direncanakan Lebih Dahulu”**

Menimbang, bahwa dalam delik kejahatan percobaan menghilangkan nyawa orang lain yang direncanakan lebih dahulu, harus dilakukan dengan opzet atau dengan sengaja.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur percobaan menghilangkan nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi, dengan sendirinya unsur “barang siapa” juga tidak terpenuhi, dengan demikian terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan primer.

**b. Dakwaan subsidair : perbuatan terdakwa diduga melanggar ketentuan pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yakni perbuatan terdakwa diduga melanggar ketentuan pasal 338 KUHP Jo pasal 53 KUHP.

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah semua subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (Naturelijk Persoon) dan Badan hukum (Rechts Persoon)

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam hal ini adalah orang (Naturelijk Persoon) yakni terdakwa Ishak Tiranda yang didakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 338 KUHP Jo. pasal 53 KUHPidana

Menimbang, bahwa inti delik (Delicts Bestanddelen) dari ketentuan pasal 338 KUHP Jo. pasal 53 KUHPidana adalah percobaan menghilangkan nyawa orang lain, maka essensi ketentuan pasal ini adalah akibat dari perbuatan percobaan menghilangkan nyawa orang lain, maka ketentuan pasal 338 KUHP Jo. 53 KUHPidana adalah delik materil.

**Ad.2. Unsur “Percobaan Menghilangkan Nyawa Orang Lain”**



Menimbang, bahwa dalam delik kejahatan percobaan menghilangkan nyawa orang lain, harus dilakukan dengan opzet atau dengan sengaja.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur percobaan menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” juga tidak terpenuhi, dengan demikian terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan subsidair.

**c. Dakwaan lebih subsidair : perbuatan terdakwa diduga melanggar ketentuan pasal 355 ayat (1) KUHP ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair, yakni perbuatan terdakwa diduga melanggar ketentuan pasal 355 ayat (1) KUHP.

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah semua subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (Naturelijk Persoon) dan Badan hukum (Rechts Persoon)

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam hal ini adalah orang (Naturelijk Persoon) yakni terdakwa Ishak Tiranda yang didakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 355 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa inti delik (Delicts Bestanddelen) dari ketentuan pasal 355 ayat (1) KUHPidana adalah “penganiayaan”, maka essensi ketentuan pasal ini adalah penganiayaan, maka ketentuan pasal 355 ayat (1) KUHPidana adalah delik materil.

**Ad.2. Unsur “Penganiayaan Berat yang Direncanakan Lebih Dahulu”**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan penembakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bukan merupakan kehendak yang direncanakan lebih dahulu untuk melukai berat saksi korban, namun luka berat yang dialami oleh saksi korban hanyalah merupakan akibat dari perbuatan tersebut, maka unsur penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu, tidak terpenuhi dari perbuatan terdakwa, dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu”, tidak terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur melakukan penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu tidak terpenuhi, dengan sendirinya “Barang siapa” juga tidak terpenuhi. Maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair lagi, yakni perbuatan terdakwa diduga melanggar ketentuan pasal 354 ayat (1) KUHP Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

**d. Dakwaan lebih subsidair lagi : perbuatan terdakwa diduga melanggar ketentuan pasal 354 aya (1) KUHP ;**

#### **Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah semua subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (Naturelijk Persoon) dan Badan hukum (Rechts Persoon)

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam hal ini adalah orang (Naturelijk Persoon) yakni terdakwa Ishak Tiranda yang didakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 354 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa inti delik (*Delicts Bestanddelen*) dari ketentuan pasal 354 ayat (1) KUHPidana adalah “penganiayaan Berat”, yang merupakan tujuan, dan untuk membuktikan unsur “barang siapa”, dalam hal ini haruslah lebih dahulu dibuktikan unsur “melukai berat orang lain”, apabila unsur melukai berat orang lain terbukti maka dengan sendirinya unsur barang siapa juga ikut terbukti, dan apabila unsur pertama tidak terbukti maka unsur ke dua juga ikut tidak terbukti.

#### **Ad.2. Unsur “Melakukan berat orang lain”**

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang telah dianalisis oleh majelis hakim, maka majelis hakim berpendapat, bahwa unsur “Melukai berat orang lain”, tidak terpenuhi, dari perbuatan terdakwa maka dengan sendirinya unsur barang siapa juga tidak terpenuhi, maka terdakwa Isak Tiranda tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melukai berat orang lain”, dengan demikian terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan lebih subsidair lagi.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan lebih subsidair lagi tidak terbukti, maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan berikutnya, yakni perbuatan terdakwa diduga melanggar ketentuan dalam pasal 356 ayat 2 KUHP.

#### **e. Dakwaan lebih lebih subsidair lagi : perbuatan terdakwa diduga melanggar ketentuan pasal 356 ayat (2) KUHP ;**

##### **Ad.1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah semua subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan Badan hukum (*Rechts Persoon*)

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam hal ini adalah orang (Naturelijk Persoon) yakni terdakwa Ishak Tiranda yang didakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 356 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa inti delik (Delicts Bestanddelen) dari ketentuan pasal 356 ayat (2) KUHPidana adalah “penganiayaan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah”, yang akibatnya pejabat tersebut mengalami luka, sehingga tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan ini, adalah delik materil, maka untuk membuktikan unsur “barang siapa”, dalam hal ini haruslah lebih dahulu dibuktikan unsur berikutnya.

**.Ad.2. Unsur “Penganiayaan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah”**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan terhadap seorang pejabat ketika menjalankan tugasnya yang sah”, tidak terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur “penganiayaan terhadap seorang pejabat ketika menjalankan tugasnya yang sah” tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” dalam pasal 356 ayat (2) KUHPidana tidak terbukti, oleh karenanya seluruh unsur-unsur ketentuan pasal 356 ayat (2) KUHPidana tidak terpenuhi, dengan demikian terdakwa Ishak Tiranda tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan terhadap seorang pejabat ketika menjalankann tugasnya yang sah”, sehingga terdakwa Ishak Tiranda dinyatakan bebas dari dakwaan lebih-lebih subsidair lagi.

**f. Dakwaan lebih lagi lebih subsidair lagi : perbuatan terdakwa diduga melanggar ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHP ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan lebih-lebih subsidair lagi tidak tidak terbukti, maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dakwaan lebih lagi lebih subsidair lagi, yakni perbuatan terdakwa diduga melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

**Ad.1. unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah semua subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (Naturelijk Persoon) dan Badan hukum (Rechts Persoon)

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam hal ini adalah orang (Naturelijk Persoon) yakni terdakwa Ishak Tiranda yang didakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa bagian inti delik (delicts bestanddelen) dari ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHPidana ini, adalah “penganiayaan”, dan akibat dari penganiayaan tersebut, orang lain mengalami luka berat, maka ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHPidana adalah merupakan delik materil, sehingga untuk membuktikan unsur “barang siapa”, dalam ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHPidana ini, maka haruslah lebih dahulu dibuktikan unsur berikutnya, yakni “penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka berat”, apabila unsur “penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka berat”, tidak terbukti, maka

unsur “barang siapa” dalam dakwaan lebih lagi lebih subsidair lagi menjadi tidak terbukti.

**Ad.1. Unsur “penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka berat”**

Menimbang, bahwa unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka berat” telah terpenuhi., dengan sendirinya unsur “barang siapa” dalam ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHPidana dengan sendirinya juga terpenuhi, oleh karenanya itu seluruh unsur-unsur ketentuan dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan lebih lagi lebih subsidair lagi penuntut umum telah terpenuhi, maka nota pembelaan tim Penasehat Hukum Terdakwa pada angka II (dua), yang menyatakan tuntutan penuntut umum kabur yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana 354 ayat (1) KUHPidana, sebab berdasarkan fakta persidangan perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan lebih lagi lebih subsidair lagi, maka nota pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut dinyatakan beralasan hukum, sehingga dapat diterima.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur ketentuan dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan lebih lagi lebih subsidair lagi, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa Ishak tiranda telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka berat” sebagaimana tersebut dalam dakwaan lebih lagi lebih subsidair lagi melanggar ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini digelar dipersidangan, majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta sebagai alasan pembenar ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk

menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut, yang merupakan *mansrea*, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur ketentuan dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan tidak ditemukannya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf atas diri dan perbuatan terdakwa, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa Ishak Tiranda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan “penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka berat”.

## **2. Pertimbangan Hukum Formil**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sebelumnya telah dilakukan tindakan penyitaan oleh penyidik dan tindakan penyitaan tersebut telah disetujui oleh ketua Pengadilan Negeri Makassar, melalui penetapan Nomor: 473/ pen. Pid/ 2013/ PN. MKS, maka barang bukti tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari apa yang sudah berlangsung dalam jalannya pemeriksaan persidangan, terdakwa Ishak Tiranda selama mengikuti proses pemeriksaan bersikap sopan, kooperatif dan tidak membuat saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum merasa tertekan dan tidak bebas dalam memberikan keterangannya didepan majelis Hakim.

Bahwa, terdakwa telah meminta maaf kepada korban, akibat dari perbuatan terdakwa terhadap saksi korban telah dimaafkan dan saksi korban juga telah meminta maaf atas perkataannya yang menjadi sebab dari adanya perbuatan terdakwa, serta terdakwa telah memaafkan saksi korban

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam analisis kasus perkara penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh aparat Kepolisian yang dalam hal ini sebagai pelaku utama adalah Ishak Tiranda, telah terbukti melakukan penyalahgunaan senjata api, dan di adili berdasarkan analisis majelis hakim dengan sumber-sumber yang berasalkan dari bukti serta saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan.
2. Majelis Hakim dalam memberikan amar putusan mulai dari amar putusan sela sampai dengan amar putusan yang mengadili saudara terdakwa Ishak Tiranda, dengan dasar-dasar dari pertimbangan-pertimbangan majelis Hakim, seperti pertimbangan hukum materil yang berisikan seluruh delik materil yang disodorkan Penuntut Umum guna mengadili terdakwa, hingga pertimbangan hukum formil dari majelis Hakim yang membahas tentang proses acara persidangan.

#### **B. Saran**

Agar kiranya Instansi Kepolisian RI lebih memerhatikan dan lebih memperketat syarat-syarat sebelum memberikan senjata api oleh anggota Kepolisian



## DAFTAR PUSTAKA

- E.Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008.
- Hutabarat, Agustin Lamasi [http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata\\_api](http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api)
- Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka, Jakarta 1995.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005.
- Meliala Adrianus, *Problema Reformasi Polri*. Penerbit Trio Repro, Jakarta 2002.
- Buku pedoman pelaksanaan tugas bintang Polri dilapangan, surat keputusan KAPOLRI No. Pol. : SKEP/297/V/2005 tanggal 17 Mei 2005
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pt. Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992
- Rahardi, Puri. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian, POLRI dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- Sadjijono, *POLRI dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008
- Skripsi Roslan Silaban, *Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Aparat Polri (studi polda Sumut)*. FH USU, Medan 2008.
- SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik
- Skripsi Atin Sri Pujiastuti, *Analisis dan Pertimbangan dan Analisis Pemakaian Senjata Api Oleh Polri*. Fisip UI, Jakarta 2009.

[www.tempo.com](http://www.tempo.com)

[www.multiplay.com](http://www.multiplay.com)

[www.google.senjata-api.html](http://www.google.senjata-api.html)

